

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kominfo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kominfo Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Dinas

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
2. Kebutuhan Komunikasi dan Informatika yang *uptodate*.

3. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
4. Kebutuhan teknis layanan jaringan dalam komunikasi informasi
5. Kebutuhan satu data se Indonesia
6. Kebutuhan keamanan dan persandian dalam informasi dan komunikasi

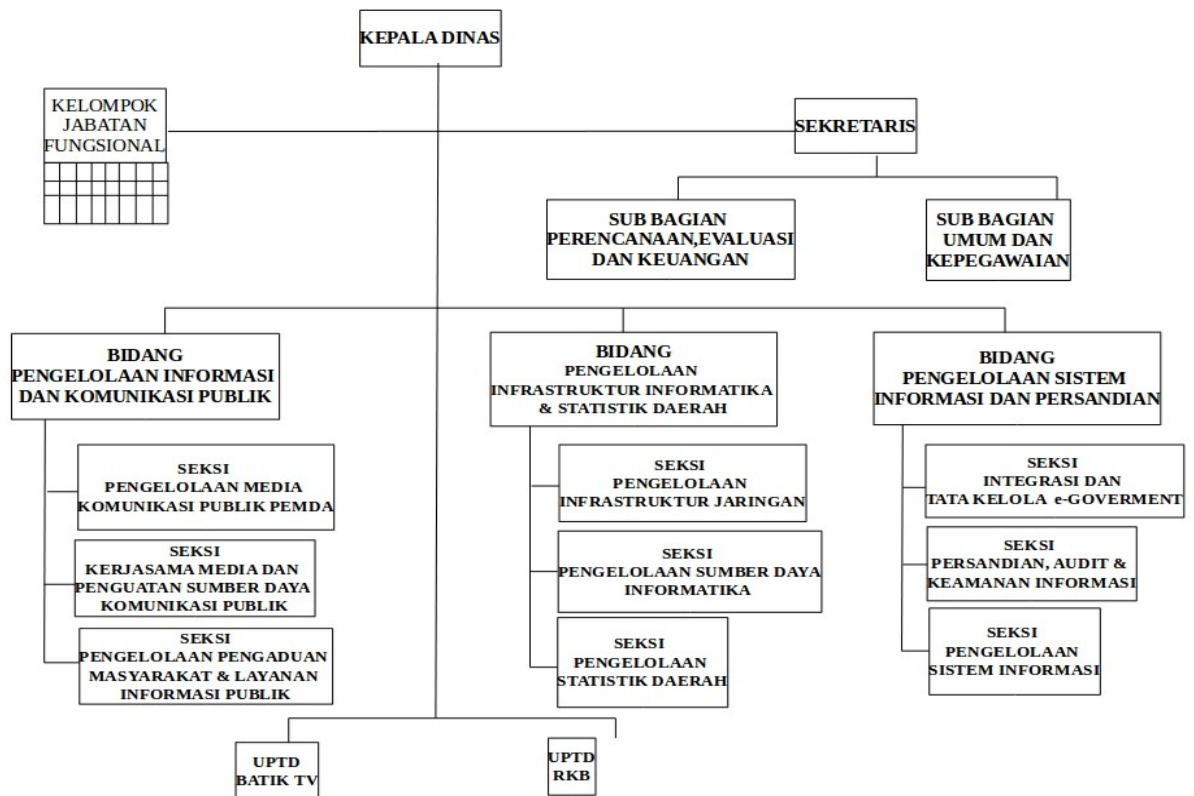
B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kominfo mempunyai fungsi :

Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. pengkoordinasian pengelola opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. pengkoordinasian pengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
3. pengkoordinasian pelayanan informasi publik dan penyediaan konten lintas sektoral;
4. pengkoordinasian pengelola media komunikasi publik pemerintah daerah dan pelayanan hubungan media di daerah;
5. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
6. pengkoordinasian layanan komunikasi intra pemerintah daerah kota dan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK Pemerintah Kota;
7. pengkoordinasian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
8. pengkoordinasian layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan daerah;
9. pengkoordinasian layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota;
10. pengkoordinasian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;
11. pengkoordinasian pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kota;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang yaitu;
2. Optimalisasi media komunikasi publik Pemda, hubungan media, koordinasi diseminasi dan pelayanan informasi antar OPD, dan kapasitas serta peran serta sumber daya komunikasi publik berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas E-Literasi (Melek TIK) masyarakat dan peran serta komunitas dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK, serta Kapasitas dan kelembagaan SDM Teknis Pengelola TIK (Infrastruktur Jaringan, DataCenter dan Aplikasi/ SIM) Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi
5. Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pekalongan serta RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;
6. Telah meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

7. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Rencana Strategis 2016-2021 merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

RPJMD yang telah ditetapkan melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, hal ini mengalami perubahan disesuaikan dengan RPJMD Kota Pekalongan sekaligus menyederhanakan indikator kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas .Kominfo Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah :
“TERWUJUDNYA KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN NILAI-NILAI RELIGIUSITAS”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) **Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;** dan
- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengemb

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 10 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kominfo. Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kominfo Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan efektivitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	0%	100%	100%	100%	100%	100 %
2	Meningkatkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	63%	65%	70%	80%	90%	100 %
3		Persentase Ketersediaan data	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	8	8	9	9	10	10
4	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	63%	65%	70%	80%	90%	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi	Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
6		Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.	Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat	2 aplikasi	4 aplikasi	6 aplikasi	8 aplikasi	10 aplikasi	12 aplikasi
7	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	0%	60%	70%	80%	90%	100 %
8		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
9	Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
10		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
11		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

B. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	persen	Tercapai sesuai target	$\frac{\sum \text{PD dan Kelurahan yg membutuhkan pengembangan Sim dan Website}}{\sum \text{PD dan Kelurahan yang difasilitasi pengembangan SIM dan website}} \times 100 \%$	APBD
2	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	Persen	Tercapai melebihi target	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang melayani pengelolaan dan saluran komunikasi publik}}{\sum \text{Jumlah perangkat daerah yang ada}} \times 100\%$	APBD
3	Persentase Ketersediaan dat	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	Jam	Tercapai melebihi target	Jumlah jam layanan siaran TV Batik	APBD
4	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	persen	Tercapai sesuai target	$\frac{\sum \text{jaringan FO di Pemkot Pekalongan (thn n - thn (n-1))}}{\sum \text{Jaringan FO di Pemkot pada thn n-1}} \times 100 \%$	APBD
5	Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	persen		$\frac{\sum \text{pengg SIM dlm pemerintahn (thn n - thn (n-1))}}{\sum \text{penggunaan SIM dlm pemerintahan tahun n-1}} \times 100 \%$	
6	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan	Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat	aplikasi		\sum aplikasi komunitas digunakan masy	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
	oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.					
7	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	persen		$\frac{\sum \text{kelurahan warganya yang mendapat capacity building TIK}}{\sum \text{jumlah kelurahan di Kota Pekalongan}} \times 100\%$	
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	persen		$\frac{\sum \text{telecenter aktif}}{\sum \text{telecenter sekarang (sejak 2017 : 250)}} \times 100\%$	
9	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	persen		Prosentase perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka.	persen		$\frac{\sum \text{informasi yang tersalurkan oleh bidang persandian dalam thn}}{\sum \text{informasi yang terjaga kerahasiaannya}} \times 100 \%$	
11	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persen		$\frac{\text{Presentase Realisasi Kinerja}}{\text{Presentase target Kinerja}} \times 100\%$	

C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kominfo Kota PekalonganTahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komuni-kasi dan Website kepada masyarakat	100%
2	Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	70%
3	Persentase Ketersediaan dat	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	9 jam
4	Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	80%
5	Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang membutuhkan pengembangan Sistem Komuni-kasi dan Website kepada masyarakat	6 aplikasi
7	Meningkatnya kualitas pelayanan data & in-formasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	70%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	100%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	100%`
10	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.069.535.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 478.593.000
3. Program peningkatan peng.sistem pelaporan cap.kin&k	Rp. 38.000.000
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp. 46.007.000
5. Program Pengemb. Komunikasi, Info dan Media Massa	Rp.3.705.260.000
6. Program Pengkajian & penelitian bid. Informasi & komu	Rp 52.500.000
7. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang kom & info	Rp. 100.000.000
8. Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp. 382.000.000
9. Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Rp. 1.846.900.000
10. ProgramOptimalisasi Penguatan teknologi informasi	Rp. 1.290.500.000
11. Program Pengembangan data/informasi statistik inf	Rp. 275.000.000
12. Program penyelenggaraan persandian untuk peng	Rp. 40.000.000
Jumlah	Rp.9.314.295.000

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap RPJMD baru sekaligus menerapkan cascading supaya terarah dan runtut sesuai jabatan diawali dengan tujuan dan sasaran (yang dimiliki oleh Kepala atau Eselon II) kemudian dijabarkan runtut sesuai dalam program (oleh Kepala Bidang atau Eselon III) dan dijabarkan ke kegiatan (oleh PPTK atau Eselon IV dst) semua permusuhan harus dijabarkan dan dipasang target dan laporan capaian dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :

B. Rekomendasi Bappeda Kota Pekalongan

- Dalam menyusun LKJIP dan Renstra disarankan untuk membuat tabel panjang sebagai dasar penyusunan target dan laporan kinerja OPD.
- Tabel panjang berisi Tujuan Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Misi RPJMD harus valid dan bisa menjadi pedoman penyusunan LKJIP selanjutnya.
- Setiap Tujuan, Sasaran dan Program sesuai dengan urutan hirarki tidak boleh menyebar harus mengkrucut sesuai kapasitas jabatan.
- Setiap Tujuan, Sasaran dan Program ada Indikator masing-masing yang tidak boleh sama karena sesuai urutan indikator tujuan mencakup bisa lebih dari satu sasaran begitu pula indikator sasaran bisa lebih dari satu indikator program sehingga membentuk kerucut
- Tujuan dan Sasaran merupakan indikator Kepala OPD
- Program (Outcome) merupakan indikator Bidang dan Sekretaris
- Kegiatan (Output) merupakan indikator PPTK.

C. Rekomendasi Inspektorat Kota Pekalongan

- LKJIP berpedoman dengan IKU (Indikator Kinerja Utama)
- Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran mempengaruhi penilaian LKJIP
- Maturitas merupakan unsur penilaian sehingga harus diterapkan dan target capaian kinerja merupakan beban yang dipertanggungjawabkan.
- Penjabaran pencapaian dimulai dari target sasaran yang dicapai dilanjutkan dengan program dan pencapaiannya serta penjelasan rinci dari masing-masing kegiatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kominfo Kota Pekalonganselaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalonganyang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kominfo.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2016

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kominfo Kota Pekalongantelah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kominfo Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisas i	Capaian	Ket
1.	Persentase Perangkat Daerah dan kelura- han yang membutuh-kan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	persen	100	84	tercapai	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	persen	70	89	tercapai	
3.	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	jam	9	9	Tercapai	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
4	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	persen	80	52	Tidak tercapai	
5	Persentase keterse-diaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, pe-nganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	persen	100	100	tercapai	
6	Jumlah aplikasi ko-munitas yang digunakan masyarakat	aplikasi	6	7	tercapai	
7	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	persen	70	100	tercapai	
8	Prosentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	persen	100	100	tercapai	
9	memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.	persen	100	100	tercapai	
10	menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.	persen	100`	100	tercapai	
11	Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan	persen	100	100	tercapai	

Penjelasan

1. Persentase PD dan Kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan website kepada masyarakat. Target 28 unit kerja dan tercapai 19 unit kerja sehingga prosentase pencapaian 70,37%, dari :

Unit kerja	Target	Capaian
Pekalongankota (domain)		
Kelurahan/KEcamatan	1	1
Sekda/Serwan	2	2
Dinas	17	12
Badan	4	2
Kantor	1	0
Inspektorat	1	1
RSUD	1	1
Satpol PP	1	1
Jumlah	28	20

2. Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL. Dengan target 28 SKPD tercapai 20 sehingga capaian 70% dikarenakan bentuk layanan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai persamaan sehingga tidak secara langsung terlibat dalam LPPL dikarenakan ada berita menyangkut warga sekitar Kelurahan dan Kecamatan terdekat.
3. Jumlah jam layanan siaran TV Batik setiap hari dengan target 8 jam dari jam 13.00 WIB s/d 22.00 WIB, sehingga tercapai
4. persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik sesuai dengan target dalam RPJMD untuk Tahun 2018 adalah sebesar 80% dengan capaian saat ini sebesar 55% yang dibagi 3 klaster yakni klaster OPD/Kec/Kel, Klaster Kesehatan, Klaster Pendidikan, dengan rincian berikut :

Unit Kerja	Jumlah 2017	Tahun 2018	Total capai	Target	Capaian
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(3x100):(4)
OPD/Kec/Kel	58	1	59	60	
Sekolah	16	3	19	100	
Puskesmas	14	0	14	14	
Jumlah	88	4	92	174	52,87%

5. Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah hal ini tercapai karena terbukti sesuai dengan perilaku yang berlaku bahwa aplikasi simkeu.pekalongankota.go.id terlaksana bahkan sampai dengan ke Kelurahan

6. Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat telah tercapai 7 aplikasi diantaranya :

Jumlah aplikasi yang dikembangkan bersama komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi kreativitas. Hal ini tercapai dari target 4 aplikasi tercapai 5 aplikasi yang bisa didownload lewat <https://play.google.com/>, aplikasi tersebut :

1. Aplikasi explore kota pekalongan.
2. Jawabanhoax.pekalongankota.go.id
3. pkk.pekalongankota.go.id
4. internetaman.pekalongankota.go.id
5. tourism.pekalongankota.go.id
6. pekalonganmail.com
7. wadulo

7. Persentase Kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi. Dari target 100% telah tercapai 100% terdiri dari dari 10 Kelompok yang dilatih e-bisnis, diantaranya

1. Himpaudi,
2. MI pringlangu
3. SMK IN
4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
5. Ikatan Wanita Pengusaha
6. Arah
7. Relawan TIK
8. Open Source
9. Kelurahan
10. Kecamatan

8. Persentase pengelola telecenter, LKK dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui pelatihan/workshop sebanyak 216 peserta dari telecenter sudah semua pernah pelatihan.

9. Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya. Adapun hasil kinerja selama pekerjaan tidak ada kendala terutama masalah persandian maka hasil 100%

10. Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Secara umum Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 menuju pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran. Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Startegis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kondisi awal	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
			Awal	2017	2018		RPJMD	Nasl	Prov
1	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	20	100	80	86.2	100	22.6	96.95
2	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.	Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.	0	91.94	100	10	10	30	-

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	
2	Sesuai Target	2 sasaran
3	Kurang Target	

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari 2 (dua) kinerja Sasaran diatas, pencapaian target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	1			1	86.20		
2	Misi 5	1			1	10		

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	1	86.20%
3	Tidak Mencapai Target		
B.	Misi 5		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	1	10 kelompok
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Dalam yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
4. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<p>Sasaran Strategis 1</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p>

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya layanan informasi publik berbasis teknologi informasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2018		%	Th 2017	%
			Target	Real		Real	
1.	Persentase Perangkat Daerah/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	60	86,28	100	62.50	100

- Analisis Keberhasilan/kegagala atas target kinerjanya
 - Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja
 - Adanya Koordinasi antar OPD, Perguruan Tinggi dan Dinas terkait
 - Sosialisasi karena OPD dan masyarakat (komunitas)
 - Penyelenggaraan Pameran dan Pekan Interaktif Daerah (PPID) dan Pertunjukan Rakyat
 - Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Mengingat dokumen yang dibutuhkan oleh PPID sangat banyak pada setiap semesternya sehingga surat edaran ke OPD tentang Permohonan data agak lambat dibalas oleh OPD sehingga petugas layanan PPID harus selalu mengingatkan untuk segera terpenuhi.
 - Solusi untuk mengatasi hambatan

Dukungan Anggaran yang memadai agar sesuai dengan kebutuhan

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran sesuai DPA) :
 - Jumlah anggaran : Rp. 206.000.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 205.749.000,-
 - Efisiensi penggunaan anggaran : Rp. 251.000,-

- Analisis program dan kegiatan (diluar DPA yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan/gerakan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat adanya Keterbukaan Informasi Publik karena masyarakat selain berperan sebagai aktor pengguna informasi publik sekaligus penilai dalam layanan informasi publik. Pengetahuan masyarakat berperan karena ada juga informasi yang dikecualikan, setiap saat dan berkala.

- Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang
 - Komitmen Walikota tetap diperlukan
 - Peran aktif Admin dimasing-masing OPD

Tabel 3.4.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi**

	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1.1 Persentase PD/Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan keterbukaan informasi Publik (KIP)	Persen	60	86.28		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	206.000.000	2.2205.749.000	99.87
		CAPAIAN					TOTAL	206.000.000	2.2205.749.000	99.87
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0.13 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 99.87 %										

Sasaran 2

Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Tercapai	
1	Cakupan Kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	5	5	100	10	10	100
Rata-rata Capaian Kinerja		10	10		100			100

3. Analisis Keberhasilan/kegagalan atas target kinerjanya

- ◆ Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja
 1. Dukungan kebijakan dalam Misi ke-5 “Mengembangkan IT (Information Technology) berbasis komunitas
 2. Tersedianya laboratorium BLC (Broadband Learning Center) sebagai sarana pembelajaran IT secara gratis pada masyarakat
 3. Tersedianya anggaran Pelatihan SDM “Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi”
 4. Komunitas IT (Relawan TIK, Dewan TIK, Puskomas, MGMP TIK, Komunitas Animasi, Komunitas Blogger, Komunitas Fotografi (INSTA)
- ◆ Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun sudah pernah dilatih apabila tidak diterapkan ataupun diuji coba terus menerus akan terlupakan
- ◆ Solusi untuk mengatasi hambatan

Diadakan pembinaan bagi keberhasilan pelaksanaan pelatihan

4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran sesuai DPA) :

- Jumlah anggaran : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi anggaran : Rp. 99.460.000,-
- Efisiensi penggunaan anggaran : Rp. 540.000,-

5. Analisis program dan kegiatan (diluar DPA yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja)
Dalam pelatihan TIK membutuhkan ketekunan dalam berusaha berkembang menunjang keberhasilan karena bisa mengakses peluang lewat media elektronik
Dalam berusaha menjadi operator pelaku bisnis online dan berpeluang dalam ikut serta pemberi informasi
6. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang
 - Memfasilitasi aplikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sedang eksis
4. Sosialisasi dalam uji coba pelaksanaan
5. Membentuk komunitas dan didukung pengembangan fitur aplikasi sesuai kebutuhan

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat	1.1 Cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	100	100	100%	Program Pelatihan SDM dalam komunikasi bidang dan informasi	100.000.000	98.99.460.000	98.99.46
CAPAIAN							TOTAL	100.000.000	98.99.460.000	98.99.46
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 0.54 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 99.46 %										

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPPA Dinas kominfo Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.314.296.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.10.379.767.236,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85.11%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 kondisi anggaran adalah **Silpa Rp. 1.816.362.764 hal ini dikarenakan ada pengadaan transmitter seharga Rp. 999.900.000,- yang dibeli dari luar negeri (Itali) dan diakhir tahun barang masih dibeacukai sehingga tidak cukup waktu dalam pembukuan dan ditunda pembayaran hingga selesai proses administrasi yang menjadi beban pembiayaan tahun 2019 sedangkan untuk penggunaan anggaran sebesar Rp. 816.462.764,- lebih efisien.**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			205.749.000	99.87
1	Melebihi/Melampaui Target	1	86.2		
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				
B.	Misi 2,			99.460.000	99,46
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target				

Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berhasil meraih prestasi dalam hal Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kota Pekalongan mendapatkan nilai 86,2 sehingga mendapatkan penghargaan sebagai “Badan Publik Informatif Utama” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4.0 Kota Pekalongan terpilih sebagai Badan Publik Informasi Utama

Prestasi lain yang patut dibanggakan di Tahun 2018 yaitu Kota Pekalongan terpilih sebagai salah satu kota yang masuk kedalam Gerakan menuju 100 Smartcity. Hal ini didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan ini Kota Pekalongan diharapkan dapat melakukan percepatan dalam mewujudkan smartcity. Bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Kominfo berupa pendampingan tenaga ahli dalam penyusunan master plan smartcity.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas kominfo Kota Pekalongan menetapkan sebanyak sepuluh (10) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 83.58 % (*interpretasi baik*)

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % (*interpretasi baik*)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak dua sasaran tersebut, secara umum telah mencapai sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.379.767.236,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.314.296.000,00 atau dengan serapan dana APBD

mencapai 85.11%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 kondisi anggaran adalah *Silpa Rp. 1.816.362.764 (terdiri dari (pengadaan transmitter seharga Rp. 999.900.000,- yang tertunda dan Rp. 816.462.764,- lebih efisien.*

Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan 2016-2021 menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018 mencapai interpretasi baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Januari 2018

KEPALA DINAS KOMINFO

KOTA PEKALONGAN

drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196508141992031005

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2018

**DINAS KOMINFO
KOTA PEKALONGAN**